





BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2029:


Paraf Koordinasi	
Plt .Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029.


Paraf Koordinasi	
Plt .Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
3. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

7. Rencana...

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029;
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;



Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

16. Rencana...

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan Daerah;
19. Daerah adalah Kabupaten Ende;
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
21. Bupati adalah Bupati Ende;
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
24. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
26. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

(3) Perencanaan ...

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3



Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Badan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan adalah:
- sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah setiap tahun.
 - sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
 - sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende;
 - sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

e. sebagai ...

e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan Tahun 2025- 2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

BAB. V ...

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas



Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Badan untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan hasil verifikasi Kepala Badan diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan kepada semua Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8

- (1) Kepala Badan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

(2) Pengendalian ...



- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. kebijakan perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diketahui oleh Sekretaris Badan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Program Badan dan;
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris Badan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan

Bagian Ketiga



Perubahan Pasal 12

- (1) Renstra Badan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA




Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 44

Paraf Koordinasi	
Plt Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	



RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH TAHUN 2025-2029



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE
2025**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

A. DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.2.2 Perumusan Isu Strategis.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	35
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	36
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	42
4.1 Uraian Program.....	42
4.2 Uraian Kegiatan.....	42
4.3 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	54

4.4 Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah...	80
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	82
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.....	82
BAB V PENUTUP.....	84

B. DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pegawai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Kepangkatan/Golongan.....	12
Tabel 2.2 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Tenaga Outsourcing Badan Kesbangpolda Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.4 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	13
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana.....	14
Tabel 2.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020-2021.....	16
Tabel 2.7 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022-2024.....	21
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpolda.....	32
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	35
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	38
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	39
Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Kesbangpolda Kab. Ende	45
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2026-2030.....	54
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	80
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpolda.....	82
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpolda.....	83

B. DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pegawai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Kepangkatan/Golongan.....	12
Tabel 2.2 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Tenaga Outsourcing Badan Kesbangpolda Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.4 PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	13
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana.....	14
Tabel 2.6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020-2021.....	16
Tabel 2.7 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022-2024.....	21
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpolda.....	32
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	35
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	38
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	39
Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Kesbangpolda Kab. Ende	45
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2026-2030.....	54
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	80
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpolda.....	82
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpolda.....	83

C. DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende11

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD.....36

C. DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende	11
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra PD.....	36

D. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

D. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

RENSTRA ini merupakan perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende menyusun RENSTRA Tahun 2025 - 2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029..

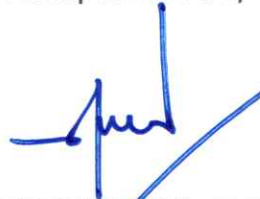
Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujudnya ta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ende,

2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende,



GABRIEL DALA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690521 199503 1 004

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi /lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1.	Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2029;
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
12.	Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende;
13.	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah

	dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2029;
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
16.	Peraturan Bupati Ende Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende;
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Perangkat Daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan rencana anggaran Perangkat Daerah, penyusunan laporan kinerja, serta untuk mengukur target capaian kinerja program.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati Ende dan Wakil Bupati Ende periode 2025-2029 ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta program dan kegiatan/sub kegiatan pada Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019

yang dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pada setiap tahun anggaran.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Perumusan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4 Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, serta Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

➤ **Tugas**

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh Pejabat-pejabat Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional serta unsur staf yang tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik Daerah.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

➤ **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, terdiri dari

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Politik dalam Negeri

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik

7. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ *Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset, pengelolaan urusan ASN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

Sekretaris Badan dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pengelolaan kehumasan.

❖ *Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa*

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Badan di bidang ideology, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

❖ *Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan*

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing

❖ *Bidang Politik dalam Negeri*

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, kepala daerah serta pemantauan situasi politik

❖ *Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik*

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.

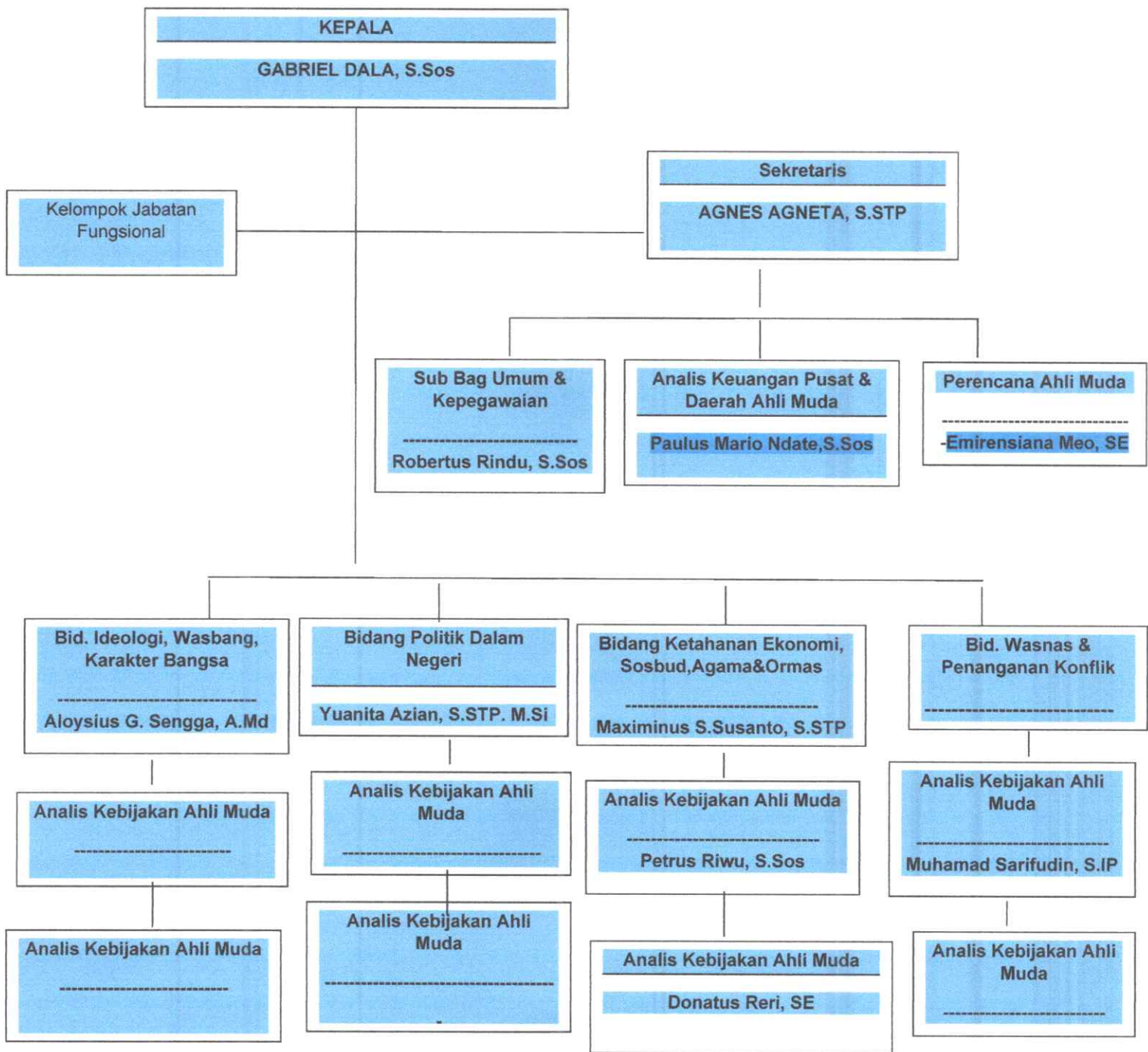
❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai dengan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melakukan kegiatan fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan keahliannya masing-masing;
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2020 adalah Seperti pada Bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Keasatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber daya lainnya berupa asset/barang inventaris. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

➤ **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende serta Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende terdapat 7 jabatan struktural dan 10 jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, yaitu :

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang
4. Kelompok Jabatan Fungsional : 10 Orang

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 PNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing keadaan s/d Bulan Juni 2025 . Rincian Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende berdasarkan pangkat/Gol/Ruang, Tingkat Pendidikan dan Diklat Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel –tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende
Menurut Kepangkatan/ Golongan
Keadaan Tahun 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV-c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV-b)	1 orang
3.	Pembina (IV-a)	4 orang
4.	Penata Tingkat I (III-d)	5 orang
5.	Penata (III-c)	0 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III-b)	1 orang
7.	Penata Muda (III-a)	2 orang
8.	Pengatur Tingkat I (II-d)	5 orang
9.	Pengatur (II-c)	0 orang
10.	Pengatur Muda tingkat I (II-b)	0 orang
11.	Pengatur muda (II-a)	--

12.	Juru Tk.I (I-d)	0 orang
	Jumlah	18 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Tabel 2.2.
PNS Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende
Menurut Tingkat Pendidikan
Keadaan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	1 orang
2.	Strata 1 (S1)	12 orang
3.	Sarjana Muda (D3)	2 orang
4.	SLTA	4 orang
5.	SLTP	Orang
	Jumlah	19 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Outsourcing yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Ende sebanyak 5 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tenaga Outsourcing Badan Kesbangpolda Kab.Ende
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1.	S1	0	
2.	SLTA	5	
	Total	5	

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Tabel 2.4
PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Keadaan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIIKUTI			DIKLAT YANG BELUM DIIKUTI
			Pim. II	Pim. III	Pim. IV	
1.	Kepala Badan	1		1	1	
2.	Sekretaris Badan	1	-	1	1	PIM III

3.	Kepala Bidang	4	-	-	3	PIM III 3 Orang, PIM IV 1 Orang
4.	Kasubbag	1		-	-	PIM IV

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

➤ Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	KET.
1	Gedung Kantor	Permanen	2	Baik
2	Mobil	Toyota New Rush	1	Baik
3	Sepeda Motor	Honda Win Wcd	1	Baik
4	Sepeda Motor	Honda Nf 125 sd	1	Baik
5	Sepeda Motor	Honda Nf 125 sd	1	Baik
6	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
7	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
8	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
9	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
10	Sepeda Motor	Honda Tiger GL200 D	1	Baik
11	Sepeda Motor	Honda Mega Pro GL	2	Baik
12	Lemari Kayu		2	Baik
13	Lemari Kayu	Lemari Kayu 2 Pintu	4	Baik
14	Mesin Absensi	Fingersport/Revo Duo 158 BNC	1	Baik
13	Filling Cabinet Besi	Brother	3	Baik
14	Meja Kerja Kayu	Kayu	8	Baik
15	Meja Rapat	Kayu	7	Baik
16	Meja ½ Biro	½ Biro	5	Baik
17	Kursi Tamu	Biro	1	Baik
18	Sofa	Mahkota	2	Baik
19	Televisi	Polytron	2	Baik
20	Wireless	Martin Roland	2	Baik
21	Camera Film	Canon/EOS 650 D	1	Baik
22	Alat Rumah Tangga Lainnya	Toa/Toa	2	Baik
23	Alat Komunikasi radio uhf lainnya		1	Baik
24	Televisi	Polytron	2	Baik
25	PC Unit		12	Baik
26	PC Unit	Intel Core 13	1	Baik
27	PC Unit	HP Aio / 22TF0144D	2	Baik

28	Laptop	Toshiba /L8 40	2	Baik
29	Laptop	Acer /E-1766	1	Baik
30	Laptop	Asus/X441MA	1	Baik
31	Notebook	Toshiba/NB510	1	Baik
32	Printer	Canon /IP 2770	1	Baik
33	Printer	Canon MP27	1	Baik
34	Printer	Canon PIXMA / PIXMA TS307	1	Baik

(Sumber Laporan Inventaris Barang Kesbangpollinmas, Keadaan Juni 2025)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan antara lain Komputer, laptop dan Printer untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Pagar Pengaman Kantor untuk keamanan aset kantor.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun periode Renstra (2020 sampai dengan 2024) dapat dilihat pada table berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende dapat dilihat dari pencapaian Indikator Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 – 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan (%)	Target		Capaian		Porsentase Capaian Kinerja s/d Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada Priode Renstra Tahun 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat	NA	100%	100%	0,00%	50%	50%	50%
		Cakupan Kegiatan Antisipasi Penangan Konflik Sosial	NA	100%	100%	33,3%	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Parade Kebangsaan dan Hari Besar Nasional	NA	3 Kali	3 kali	1 kali (33,33 %)	3 kali 100%	3 kali 100%	3 kali 100%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	Cakupan Kegiatan Pembinaan Terdapat Parpol, Ormas, LSM dan OKP	NA	100%	100%	100%	66%	66%	66%

Penjelasan:

Capaian Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah sebagai berikut :

➤ Sasaran Strategis

Sasaran I : Meningkatkan Keamanan dan ketertiban

❖ Indikator Kinerja

1. Cakupan Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat

Pada tahun 2020 dan 2021 target kegiatan pembinaan terhadap masyarakat dilakukan melalui rangkuman kegiatan forum – forum yang terdiri dari kegiatan forum Kerukunan Umat beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Daerah namun tidak satupun kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020 karena anggaran untuk kegiatan dimaksud telah direfocusing untuk menekan laju penyebaran covid 19 di Kabupaten Ende, sehingga yang targetkan sebanyak 100 %, namun dalam pelaksanaan di tahun 2020 adalah 0 %. Namun pada tahun 2021 hanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dilaksanakan di Kecamatan Ndori. Pada Tahun 2021 dilakukan Monitoring pada beberapa kecamatan Sehingga yang targetkan sebanyak 100 %, namun dalam pelaksanaan di tahun 2021 adalah 50 %.

2. Cakupan Kegiatan antisipasi penanganan konflik social

Pada target kinerja tahun 2020 Cakupan Kegiatan Antisipasi penanganan konflik social mencakup 6 Kegiatan namun yang bias dilaksanakan di tahun 2020 hanya 2 kegiatan. Kegiatan yang masuk kedalam kegiatan antisipasi penanganan konflik social diantaranya :

1. Fasilitasi penyelesaian masalah adat antara suku embuleko dan suku embungguwa di Desa Tenda, Kecamatan Wolojita dan tidak menghasilkan kesepakatan.
2. Fasilitasi penyelesaian masalah adat yang berhubungan dengan batas wilayah adat antara masyarakat Desa Saga Kecamatan Detusoko dan Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur telah diselesaikan secara damai
3. Monitoring masalah kantibmas berdasarkan laporan masyarakat antara lain : Pemagaran Rumah sakit Pratama Wewaria, Pelanggaran adat di Desa Nduaria, pemantauan pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid 19 dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

Sehingga yang ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 100 % dengan 6 Kegiatan, namun pelaksanaannya hanya 2 kegiatan dengan realisasinya 33%.

Pada tahun 2021 Cakupan Kegiatan Antisipasi penanganan konflik sosial mencakup 3 Kegiatan yaitu Koordinasi dengan Aparat Intelijen (Adanya Kerjasama dengan Tim Intelijen (Kodim 1602 Ende, Polres Ende, Brimob Sub Den III Pelopor Ende, BIN), Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah berjumlah 21 Orang dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat berjumlah 14 Orang, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berjumlah 27 Intansi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Kegiatan yang masuk kedalam kegiatan antisipasi penanganan konflik social diantaranya :

1. Memfasilitasi Penyelesaian masalah Penyegehan Puskesmas Mukusaki oleh unsur mosalaki di Kecamatan Wewaria
 2. Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Tanah Mosalaki Tana Au di Kecamatan Lepembusu Kelisoke
 3. Penyelesaian Masalah Rehab Rumah Adat di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu
 4. Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Tanah antara Mosalaki Tebe Gai dan Mbotu Da di Kecamatan Detukeli, namun masing – masing pihak tetap mempertahankan hak ulayatnya sehingga tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dan menempuh jalur hukum.
 5. Masalah Penyerobotan Tanah Ulayat Oleh Mosalaki Leke di Desa Kekasewa Kecamatan Ndonga
 6. Penyelesaian Perselisihan tanah sekolah di SDK Nio Wula Desa Nio Wula Kecamatan Detusoko
 7. Mediasi Masalah Limbah Ampas Tahu di Kelurahan Lokoboko
 8. Mediasi Masalah tanah antara mosalaki di kelurahan Lokoboko
3. Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan Hari Besar Nasional

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kali dan realisasinya hanya 1 kali yaitu pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020. Sedangkan untuk parade kebangsaan dan apel kesadaran ditiadakan karena adanya penyebaran virus Covid 19, sehingga capaian realisasinya 33,3 %.

Pada Tahun 2021, Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende menarget 3 kegiatan yaitu Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni dan Hari Pahlawan 10 Nopember. Dalam rangka menjaga NKRI dan kesatuan dan persatuan bangsa serta rasa patriotisme Badan Kesbangpol Daerah Menyelenggarakan 3 kegiatan tersebut Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021, Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 2021 dan Hari Pahlawan 10 Nopember 2021 sehingga sehingga capaian realisasinya 100 %.

❖ *Sasaran Kedua : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik*

Indikator Kinerja

1. Cakupan Kegiatan Pembinaan Parpol. Ormas dan LSM

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pembinaan politik masyarakat, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi forum-forum diskusi politik melalui pertemuan/rapat dengan beberapa partai politik yang dilaksanakan di Kecamatan Lepembusu Kelisoke tanggal 17 Maret 2020;
- b. Penyusunan data base ormas, Parpo tahun 2020 dengan sasaran 12 (duabelas) partai politik yang ada di Kabupaten Ende, sedangkan untuk pendataan Ormas pada tahun 2020 ada 73 Ormas dengan rincian tahun 2019 ada 65 Ormas dan di tahun 2020 ada 8 ormas baru yang terdaftar.
- c. Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kinerja & Akuntabilitas Bantuan Keuangan kepada Parpol sebanyak 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi pada Pileg 2020

Sehingga yang ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 100 % dengan 3 Kegiatan, dengan pelaksanaannya 3 kegiatan dengan realisasinya 100 %

Sedangkan Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pembinaan politik masyarakat dan pembinaan Organisasi Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Bidang Politik Dalam Negeri telah melakukan kegiatan rapat Persiapan pencairan dan evaluasi terhadap para pengurus partai politik, Rapat Tim Verifikasi Keuangan Partai Politik, Monitoring keberadaan PAC Partai Politik di 21 Kecamatan dan Koordinasi/silahturahmi dengan para pengurus partai politik untuk mengetahui perkembangan persiapan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.

Bidang Politik Dalam Negeri memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi kinerja & Akuntabilitas Bantuan Keuangan kepada Parpol sebanyak 12 (Dua Belas) partai politik yang mendapatkan kursi pada Pileg 2021 yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Berkarya.

2. Penyusunan Data Base Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 ada 60 Ormas/Yayasan dengan rincian tahun 2019 ada 55 Ormas dan di tahun 2021 ada 5 ormas/ Yayasan baru yang terdaftar yaitu Yayasan Bhakti Luhur Malang Cabang Ende, Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK), Yayasan Flores Children Development (FREN), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Pulau Ende.

Dalam Penyusunan Data Base ormas Juga dilakukan Sosialisasi tentang Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti oleh Beberapa Ormas dan Yayasan yang berada di Kabupaten Ende

Tabel 2.7
Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2022 – 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan (%)	Tar 2022	Get 2023	2024	Capaian 2022	2023	2024	% Capaian Kinerja s/d Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Priode Renstra Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan Masyarakat yang Pancasilasi	Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	NA	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%
		Jumlah Parpol Yang dibina	NA	12 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	100%	91,6 %	91,6 %	91,6%	91,6%
		Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter bangsa	NA	100%	100%	100%	55,56 %	62,5 %	87,5 %	87,5%	87,5%
		Prosentase Ormas dibina	NA	44%	44%	44%	100% %	88,63 %	119%	119%	119%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Kesbangpolda	CC	B	B	B	B	B	B	B	B

Penjelasan :

Capaian indikator kinerja Sasaran sampai akhir periode Renstra (Tahun 2024), sebesar 100 %, dengan **Kriteria: TINGGI**, yang merupakan akumulasi dari pencapaian dari 3 (tiga) indikator kinerja SASARAN, sebagai berikut:

- Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, yang ditargetkan mencapai 100 % pada akhir periode Renstra (Tahun 2024), dan tercapai sebesar 100,00 %;
- Jumlah Parpol Yang dibina, yang ditargetkan mencapai 12 Parpol dengan Namun sampai dengan Tahun 2024 ada 1 partai yang terkendala kepengurusannya sehingga tidak dicairkan Bantuan Keuangannya sehingga Capaian pada akhir periode Renstra (Tahun 2024), dan tercapai sebesar 91,6%;
- Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter bangsa, yang ditargetkan 7 Kegiatan dengan persentase 100% Namun

sampai dengan akhir periode (Tahun 2024) tercapai 87,5%.

- Prosentase Ormas Yang dibina yang ditargetkan 44 % pada akhir periode Renstra (Tahun 2024) tercapai 119%
- Nilai AKIP Badan Kesbangpolda, yang ditargetkan mencapai Nilai B pada akhir periode Renstra (Tahun 2024), dan tercapai 100,00 %;

3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 – 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
 Anggaran dan Realisasi Belanja
 Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende 2020-2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN 2020		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	29.240.000	29.210.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran			100.000.000	100.000.000				
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan/ Tim Kewaspadaan Dini Daerah	17.310.000	17.265.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	379.562.878	378.815.878	439.990.041	427.890.041	854.000.000	853.982.253	344.468.500	321.566.250
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	39.375.000	39.375.000			Pelaksanaan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	25.249.800	25.249.800						
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	22.049.000	22.049.000			Pembentukan Paskibraka							528.029.000	520.764.991
		Penyusunan Data Base Parpol, Ormas, LSM	5.622.200	5.622.200	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	819.673.232	819.629.164	769.533.222	769.533.222	3.833.160.022	2.299.407.710	52.696.282.772	52.416.192.748

		Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	9.555.000	9.105.000			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			42.408.400	42.408.400			402.720.200	393.647.523
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660.000	659.000			Pelaksanaan Monev Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			28.800.000	28.800.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	28.700.000	20.772.338	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			70.403.600	70.403.600				
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	22.000.000	22.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	45.726.960	45.096.960			25.000.000	25.000.000	24.900.000	14.174.000

		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionla	1.045.500	1.045.000			Pelaksanaan Monev di dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24.292.728	24.292.728	13.557.200	13.467.200				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.250.000	21.250.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							24.920.000	22.473.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.365.800	33.206.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			164.638.600	164.013.600			12.550.000	9.560.000
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	17.830.000	17.830.000			Pelaksanaan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							5.050.000	4.295.000

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2.130.000	2.120.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.514.182	62.558.728	98.564.600	97.504.600	10.000.000	9.987.000	49.952.000	47.662.030
		Penyediaan Makanan dan Minuman	19.574.000	19.574.000			Pelaksanaan Movev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000		
		Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	71.300.000	70.696.766			Pelaksanaan Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	175.000.000	175.000.000	723.800.000	723.795.000	798.000.000	798.000.000	792.635.000	761.070.291
		Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	91.578.000	91.574.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.514.182	62.558.728	98.564.600	97.504.600	10.000.000	9.987.000	49.952.000	47.662.030

		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.047.000	2.047.000			Pelaksanaan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Korjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.300.000	1.300.000			Pelaksanaan Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	175.000.000	175.000.000	723.800.000	723.795.000	798.000.000	798.000.000	792.635.000	761.070.291
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.312.500	48.298.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.647.209	9.610.2000	2.350.000	2.350.000	3.000.000	3.000.000	2.440.000	1.711.955
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	2.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.905.000	4.905.000	1.567.165	1.567.000			350.000	328.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.830.000	8.161.800			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	822.5000	822.5000	1.122.500	1.222.500			310.000	310.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan OPD	6.200.000	6.200.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.778.000	18.778.000	48.600.000	48.600.000			310.000	310.000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							510.000	128.955
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.432.521.865	2.341.874.866	2.236.447.530	2.159.572.292	1.842.418.916	1.837.278.198	1.560.320.528	1.558.640.526
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan	25.500.000	25.500.000	27.366.000	27.300.000				
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.410.000	1.410.000	401.600	401.600				
					Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah		Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	32.4000.000	32.4000.000	32.400.000	32.400.000				

Dari tabel anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2024 dapat dikatakan baik karena rata-rata rasio diatas 90 %.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, melayani :

1. Forum Komunitas Intelijensi Daerah (KOMINDA)
2. Forum Kerukunan Umat Beragama
3. Forum Pembauran Kebangsaan
4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
5. Tim Penanganan Konflik Sosial
6. Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
7. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
8. Partai Politik
9. Perangkat Daerah
10. Sekolah Menengah Atas

Dalam Pelaksanaan Tugasnya masing-masing :

- 1) Forum Komunitas Intelijensi Daerah
 1. Mendeteksi secara dini masalah – masalah yang ada di wilayah Kabupaten Ende yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah.
 2. Pengambilan langkah-langkah cepat, tepat dan tegas untuk menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial

Adapun Instansi Vertikal yang terlibat adalah :

- Kodim 1602 Ende
- Polres Ende
- Kejari Ende
- Brimob Detasemen B Sub Den III Pelopor Ende
- Pos Pemantauan AL

- 2) Forum Kerukunan Umat Beragama

Koordinasi terkait masalah toleransi kehidupan umat beragama

Adapun Intansi Vertikal yang terlibat adalah : Kementrian Agama Kabupaten Ende

- 3) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Untuk memperkuat wawasan kebangsaan tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ende sehingga kehidupan social, kemasyarakatan dan keagamaan akan semakin membaik.

- 4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Untuk melakukan deteksi dini seperti cegah dini dan lapor dini terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban di masing – masing wilayah kecamatan.
- 5) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Materi terkait masalah situasi/konflik social yang terjadi di Kabupaten Ende yang akan dibahas dalam rapat Tim setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
Adapun Instansi yang terlibat adalah :
 - Polres Ende
 - Kodim 1602 – Ende
 - Kejaksaan Negeri Ende
 - Kepala BIN Flores Lembata
 - Pol TNI AL Ende

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan kinerja capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya dan memerhatikan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Daerah dirumuskan **masalah pokok** yang dihadapi antara lain:

1. Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan kurangnya peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat
3. Kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Daerah yang belum optimal

Masalah pokok diatas ditelaah dalam masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Pemetaan Permasalahan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende

	MASALAH POKOK	NO	MASALAH	NO	AKAR MASALAH
1	Kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Daerah belum optimal	1	Belum optimal pelaksanaan Tusi Badan Kesbangpol Daerah sebagai pembantu Bupati dalam	1.1.	Pengelolaan Administrasi Perkantoran belum optimal
				a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol Daerah belum optimal dilaksanakan

			menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan desa	b	Manajemen/Administrasi Keuangan Badan Kesbangpol Daerah belum optimal
				c	Manajemen Adminitrasi Umum belum baik (Penataan kepegawaian, penataan administrasi surat menyurat, administrasi perlengkapan dan peralatan kantor, manajemen aset belum baik,
2	Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2	Rendahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, terutama generasi muda	2.1.	Masih rendah pembinaan Ideologi Pancasila dan Idelogi Pancasila
				2,2	Masih Rendahnya Pemahaman Pancasila dalam kehidupan bernegara
				2.3.	Pendidikan Politik bagi masyarakat maupun kader parpol belum dijalankan
				2,4	Banyaknya Ormas yang belum terdaftar
3	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan kurangnya peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat	3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan rendahnya peran dan partisipasi ormas.	3,1	Pembinaan Ormas belum optimal
				3.2.	Masih rendah peran dan partisipasi ormas dalam kehidupan bermasyarakat

Hasil identifikasi Permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Ende, selanjutnya menjadi dasar di rumuskan Isu Strategis.

b. Perumusan Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan, isu global, nasional, dan daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Daerah.

- **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.**
- Berdasarkan Visi Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesatuan bangsa dan politik mendukung pencapaian program pembangunan daerah **Ende Toleran** dengan misi ke 5 **'Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing'**.
- **Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.**

Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri "Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi- 24 institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

➤ **Telaahan Renstra Provinsi.**

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : " Mewujudkan NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan", yang diwujudkan melalui 5 Misi yaitu :

1. Infrastruktur Berkelanjutan
2. Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial
3. Pendidikan Berkualitas
4. Kesejahteraan Sosial
5. Pembangunan Berkelanjutan.

➤ **Telaahan Isu Kajian lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029

1. Ketimpangan Sosial
2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah belum Optimal
3. Akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang kurang merata
4. Tingkat resiko bencana dan degradasi lingkungan hidup
5. Sistem tata kelola pemerintah yang belum optimal

➤ **Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sangatlah beragam dan luas, bergantung pada karakteristik geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Adapun beberapa potensi Daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila
2. Partai Politik dan Ormas

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci **isu strategis** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut

1. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai dasar penguatan idiologi Pancasila.
2. Meningkatkan Pembinaan Ormas dan Pengawasan terhadap Ormas
3. Meningkatkan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya
4. Peningkatan Partisipasi berpolitik di daerah

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

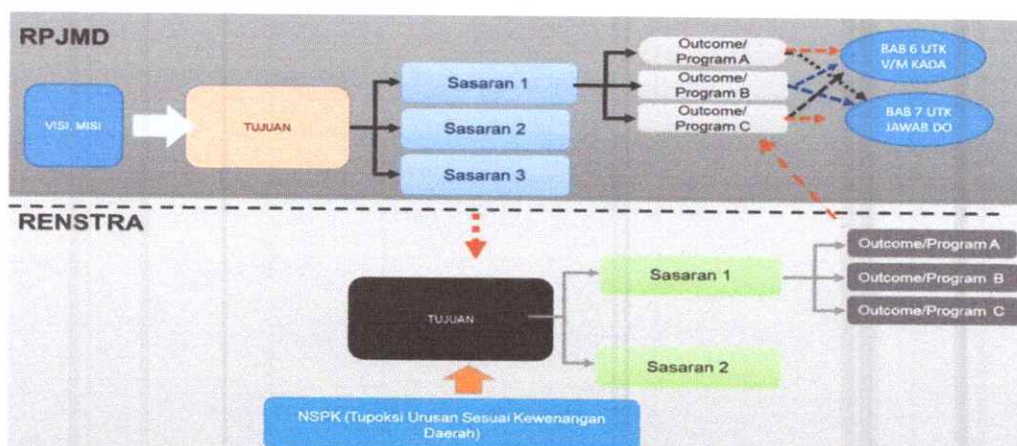
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Sistem Tata Kelola Lembaga yang belum optimal	Memperkuat Persatuan dan Kesatuan bangsa	Mewujudkan Kerukunan dan Persatuan	Membangun Kesadaran Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai dasar penguatan idiologi Pancasila. Meningkatkan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya
Partisipasi Politik dan Organisasi Masyarakat	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan rendahnya peran dan partisipasi ormas.	Sistem Tata Kelola Lembaga yang belum optimal	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Membangun Kemitraan dengan Parrpol dan Ormas	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan	Meningkatkan Pembinaan Ormas dan Pengawasan terhadap Ormas Peningkatan Partisipasi berpolitik di daerah

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, oleh karena itu dalam perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende harus selaras dengan pencapaian Sasaran, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Gambar 3.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dengan memperhatikan Gambar 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa penetapan Tujuan RENSTRA PD merupakan penjabaran dari Sasaran RPJMD, dengan mengacu kepada NSPK yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah , serta ditetapkan dengan Indikator Kinerja *outcome* Program dalam RENSTRA Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan dari Sasaran RPJMD dengan kinerja yang terukur, dalam rangka mendukung terwujudnya **MISI KESATU** dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, yaitu: **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”**

Dengan **Tujuan Kedua** , yaitu: **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Unggul dan Berkarakter”**

Sasaran Kedua yaitu **“ Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda”**

Berdasarkan Misi Kesatu, Tujuan Kedua dan Sasaran Kedua dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 diatas, maka TUJUAN yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, adalah:

Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda.

Dengan Indikator : *Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda*

1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Adapun **SASARAN** yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029, adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda

Pencapaian Sasaran dilakukan dengan memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran masing-masing, sebagai berikut:

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

- Indikator Kinerja : Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda**

- Indikator Kinerja : Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda

Untuk mengetahui lebih jelas Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja masing-masing dan Target Kinerja jangka menengah Renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, dapat dilihat uraiannya pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026-2029

No.	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Target T				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda	Terwujudnya Masyarakat dan Generasi Muda yang memahami Wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Pancasila	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda	67,10 %	67,30 %	67,40 %	67,50 %	68,00 %
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende	B	B	B	B	B

1.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. Adapun beberapa strategi yang bisa dirumuskan adalah :

1. Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa
2. Penguatan dan Pembinaan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik
3. Pengendalian, pendataan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pengendalian dan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya
5. Peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2026 -2029

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
Identifikasi Sosial Budaya & Konsolidasi Komunitas	Penguatan Pendidikan Toleransi & Budaya Damai	Pengembangan Media Ekspresi dan Ruang Inklusif	Kolaborasi Lintas Sektor dan Literasi Sosial Digital	Evaluasi, Institusionalisasi & Penguatan Identitas Toleran
Fokus: Pemetaan keberagaman & penguatan modal social	Fokus: Pendidikan karakter dan penguatan nilai damai sejak dini	Fokus: Wadah kreativitas lintas identitas dan pemajuan seni budaya damai	Fokus: Penguatan jejaring, literasi digital, dan kontra-narasi	Fokus: Pelembagaan nilai toleransi dalam sistem dan identitas daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan etnis, agama, adat, dan kelompok sosial di seluruh kecamatan • Dialog lintas tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda • Penyusunan Rencana Aksi Daerah Toleransi dan Moderasi Beragama • Sosialisasi nilai-nilai kebhinekaan di sekolah dan ruang publik • Pembentukan Forum Toleransi dan Kebudayaan Masyarakat Ende 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi kurikulum pendidikan karakter dan kebhinekaan di sekolah • Pelatihan guru, penyuluh agama, dan aparat desa tentang toleransi aktif • Program Sekolah Toleransi dan Kampung Harmoni • Festival budaya lintas suku/agama (tahunan) dengan partisipasi semua elemen • Penguatan peran rumah ibadah dan komunitas dalam menciptakan ruang damai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan atau revitalisasi Taman Toleransi dan Budaya di pusat kabupaten • Pendampingan komunitas seni budaya minoritas untuk tampil di ruang publik • Pembuatan konten kreatif toleransi oleh generasi muda (film pendek, mural, podcast) • Pendirian Pojok Toleransi di sekolah, kantor pemerintah, dan ruang publik • Penyelenggaraan Pekan Toleransi Ende tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan aktif pelaku usaha, media lokal, LSM, dan akademisi dalam promosi toleransi • Program literasi digital dan kontra-narasi intoleransi di media sosial • Pelatihan bagi aparat desa dan pemuda dalam mediasi sosial dan resolusi konflik • Pengembangan modul pelatihan toleransi berbasis kearifan lokal • Kampanye "Ende Rumah Bersama" secara massif 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi program ENDE TOLERAN dan penyusunan laporan capaian daerah • Institusionalisasi nilai-nilai toleransi dalam peraturan daerah dan SOP layanan publik • Penguatan peran FKUB, Lembaga Adat, dan Forum Pemuda Lintas Agama • Penetapan Ende sebagai Kabupaten Toleran dan Kota Dialog Budaya Nasional • - Replikasi program toleransi ke sekolah, desa, dan komunitas lainnya secara mandiri

1.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPJMD, serta selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun **ARAH KEBIJAKAN** Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029 dirumuskan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya
5. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Tabel 3.4

Arah Kebijakan RPJMD Kab. Ende Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025 -2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	KETERANGAN
2. Penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan Penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	• Berkaitan dengan kinerja pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan
	2. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan	• Berkaitan dengan kinerja pelaksanaan Bidang Ideologi dan karakter Bangsa
	3. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	• Berkaitan dengan kinerja pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negri
	4. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya dan	• Berkaitan dengan kinerja

	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	pelaksanaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya dan organisasi kemasyarakatan
	5. Meningkatkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Pemantapan Bidang Nasional dan Konflik	• Berkaitan dengan kinerja pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, menyelenggarakan Urusan Unsur Pemerintahan Umum.

Dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende melaksanakan sebanyak 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan, 5 (lima) Program Urusan Unsur Pemerintahan Umum.

Adapun uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, sebagai berikut:

4.1 Uraian Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Urusan Pemerintahan Umum

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.2 Uraian Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Kegiatan Sebagai Berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social, budaya
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik social

4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NPJK dan Sasara RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda	Terwujudnya Masyarakat dan Generasi Muda yang memahami Wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Pancasila				Indikator Tujuan : Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
		Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda			Indikator Sasaran : Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Indikator Program : Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Sub Kegiatan :Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka
						Sub Kegiatan :Pembentukan Paskibraka
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila
						Sub Kegiatan :Pengkangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila
			Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Parpol		Indikator Program : Prosentase Pendidikan Politik pada kader Parpol	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Tugas Paskibraka
			Presentase Ormas yang aktif		Indikator Program : Presentase Ormas yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

			Prosentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		Indikator Program : Prosentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Prosentase Konflik Sosial Yang diselesaikan		Indikator Program : Prosentase Konflik Sosial Yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewaspdaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewaspdaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indikator Sasaran :Nilai AKIP Badan Kesbangpolda	
					Indikator Program : Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
						Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Fasilitas Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Mebel
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL DAERAH KAB. ENDE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.550.000.000,00		4.639.180.000,00		4.769.077.040,00		4.950.301.970,00		5.108.711.634,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.000.000.000,00		2.039.200.000,00		2.096.297.600,00		2.175.956.909,00		2.245.587.526,00		
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	Persentase Penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun (%)	100	100	2.000.000.000,00	100	2.039.200.000,00	100	2.096.297.600,00	100	2.175.956.909,00	100	2.245.587.526,00	8.01.0.00.0.00.53.00	00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000,00		4.800.000,00		5.600.000,00		6.400.000,00		7.200.000,00		
Indeks Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.500.000,00	1	4.800.000,00	1	5.600.000,00	1	6.400.000,00	1	7.200.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7		7		7		7		7			

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		3		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	500.000,00	2	600.000,00	2	700.000,00	2	800.000,00	3	900.000,00	
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	

8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	500.000,00	7	600.000,00	7	700.000,00	7	800.000,00	7	900.000,00		
8.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4	4	500.000,00	4	600.000,00	4	700.000,00	4	800.000,00	4	900.000,00		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.719.401.306,00		1.725.250.000,00		1.750.897.600,00		1.793.356.909,00		1.835.487.526,00		
Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	1.719.401.306,00	1	1.725.250.000,00	1	1.750.897.600,00	1	1.793.356.909,00	1	1.835.487.526,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	21		21		21		21		21		

8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.716.901.306,00		1.722.250.000,00		1.747.397.600,00		1.789.356.909,00		1.830.987.526,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	21	1.716.901.306,00	21	1.722.250.000,00	21	1.747.397.600,00	21	1.789.356.909,00	21	1.830.987.526,00	
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	500.000,00	12	600.000,00	12	700.000,00	12	800.000,00	12	900.000,00	
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				500.000,00		600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	

8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				500.000,00		1.200.000,00		1.800.000,00		2.400.000,00		3.000.000,00		
Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	500.000,00	1	1.200.000,00	1	1.800.000,00	1	2.400.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		
8.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		
8.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		

	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)													
8.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	1	500.000,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.300.000,00		18.200.000,00		21.500.000,00		23.600.000,00		26.700.000,00		
Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	17	2.300.000,00	17	18.200.000,00	20	21.500.000,00	20	23.600.000,00	20	26.700.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	0	1		1		1		1		1			

	dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)													
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	100.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
8.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				100.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	17	100.000,00	17	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00		
8.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		200.000,00		500.000,00		600.000,00		700.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	0,00	1	200.000,00	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
8.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.535.724,00		97.800.000,00		117.400.000,00		143.750.000,00		160.500.000,00		
Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	12	88.535.724,00	12	97.800.000,00	12	117.400.000,00	12	143.750.000,00	12	160.500.000,00		

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000,00		600.000,00		700.000,00		750.000,00		800.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	500.000,00	1	600.000,00	1	700.000,00	1	750.000,00	1	800.000,00	
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.312.975,00		32.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	30.312.975,00	4	32.000.000,00	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00	
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.037.749,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	2	2	5.037.749,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	

	Disediakan (Paket)													
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00		200.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	0,00	1	200.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.476.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.476.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.009.000,00		55.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	12	50.009.000,00	12	55.000.000,00	12	70.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.834.000,00		65.900.000,00		68.300.000,00		71.100.000,00		73.800.000,00		
Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	62.834.000,00	1	65.900.000,00	1	68.300.000,00	1	71.100.000,00	1	73.800.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.900.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	31.900.000,00	2	33.000.000,00	2	34.000.000,00	2	35.000.000,00	2	36.000.000,00		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.400.000,00		20.400.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	19.400.000,00	1	20.400.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00		
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.534.000,00		7.000.000,00		7.300.000,00		7.600.000,00		7.800.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	6.534.000,00	1	7.000.000,00	1	7.300.000,00	1	7.600.000,00	1	7.800.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.917.440,00		99.400.000,00		102.600.000,00		105.800.000,00		108.000.000,00		
Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	97.917.440,00	1	99.400.000,00	1	102.600.000,00	1	105.800.000,00	1	108.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	1	1.500.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.317.440,00		31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	30.317.440,00	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	33.000.000,00	1	34.000.000,00		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	1	1.500.000,00		

8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.600.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		71.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	65.600.000,00	4	66.000.000,00	4	68.000.000,00	4	70.000.000,00	4	71.000.000,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.011.530,00		26.650.000,00		28.200.000,00		29.550.000,00		30.900.000,00		
Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	25.011.530,00	3	26.650.000,00	3	28.200.000,00	3	29.550.000,00	3	30.900.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.011.530,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	20.011.530,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000,00		550.000,00		600.000,00		650.000,00		700.000,00		

Tersebidanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	500.000,00	3	550.000,00	3	600.000,00	3	650.000,00	3	700.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000,00		1.700.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	1.500.000,00	2	1.700.000,00	2	2.000.000,00	2	2.100.000,00	2	2.200.000,00		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.800.000,00	1	1.900.000,00	1	2.000.000,00		
8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.800.000,00	1	1.900.000,00	1	2.000.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		842.095.325,00		
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	750.000.000,00	100	764.700.000,00	100	786.111.600,00	100	815.983.840,00	100	842.095.325,00	8.01.0.00.0.00.53.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		842.095.325,00		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di tahun n	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	15	750.000.000,00	20	764.700.000,00	25	786.111.600,00	27	815.983.840,00	29	842.095.325,00		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

Laporan Pembinaan Kepaskibrakaan dan Laporan Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
Jumlah Paskibraka (Orang)	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	60	62	64	65	66	66	66	66				
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	500	600	600	600	600	600	600	600	600				
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	0	1	1	1	1	1	1	1	1				

	Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)													
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	60	10.000.000,00	62	11.000.000,00	64	12.000.000,00	65	13.000.000,00	66	14.000.000,00		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				267.500.000,00		274.300.000,00		279.311.600,00		294.783.840,00		307.495.325,00		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	500	600	267.500.000,00	600	274.300.000,00	600	279.311.600,00	600	294.783.840,00	600	307.495.325,00		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10.000.000,00		13.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	13.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				457.500.000,00		460.000.000,00		470.000.000,00		480.000.000,00		490.000.000,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	27	27	457.500.000,00	27	460.000.000,00	27	470.000.000,00	27	480.000.000,00	27	490.000.000,00		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		

Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	15	1.000.000,00	20	2.000.000,00	25	3.000.000,00	27	4.000.000,00	29	5.000.000,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		842.095.324,00		
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Prosentasi Pendidikan Politik pada Kader Partai (%)	0	100	750.000.000,00	100	764.700.000,00	100	786.111.600,00	100	815.983.840,00	100	842.095.324,00	8.01.0.000.00.53.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		842.095.324,00		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	1	1	750.000.000,00	1	764.700.000,00	1	786.111.600,00	1	815.983.840,00	1	842.095.324,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	30		35		40		45		47			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	200	30		30		30		30		30		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				736.132.000,00		745.250.000,00		758.255.800,00		775.491.920,00		790.747.767,00	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	30	736.132.000,00	35	745.250.000,00	40	758.255.800,00	45	775.491.920,00	47	790.747.767,00	

8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6.580.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		7.000.000,00		7.200.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	200	30	6.580.000,00	30	6.600.000,00	30	6.800.000,00	30	7.000.000,00	30	7.200.000,00		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5.788.000,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	0	1	5.788.000,00	1	6.000.000,00	1	6.100.000,00	1	6.200.000,00	1	6.500.000,00		
8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				1.500.000,00		6.850.000,00		14.955.800,00		27.291.920,00		37.647.557,00		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	1	1	1.500.000,00	1	6.850.000,00	1	14.955.800,00	1	27.291.920,00	1	37.647.557,00		

8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				75.000.000,00		76.470.000,00		78.611.160,00		81.598.387,00		84.209.537,00	
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Prosentase Ormas yang Aktif (%)	52	56	75.000.000,00	57	76.470.000,00	58	78.611.160,00	59	81.598.387,00	60	84.209.537,00	8.01.0.00.0.00.53.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				75.000.000,00		76.470.000,00		78.611.160,00		81.598.387,00		84.209.537,00	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di tahun n	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	6	75.000.000,00	6	76.470.000,00	6	78.611.160,00	6	81.598.387,00	6	84.209.537,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	40	50		50		50		50		50		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	40	30		40		43		45		47		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25.000.000,00		24.470.000,00		24.611.160,00		25.598.387,00		26.209.537,00	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	40	50	25.000.000,00	50	24.470.000,00	50	24.611.160,00	50	25.598.387,00	50	26.209.537,00	

	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)													
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				40.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	40	30	40.000.000,00	40	41.000.000,00	43	42.000.000,00	45	43.000.000,00	47	44.000.000,00		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	6	10.000.000,00	6	11.000.000,00	6	12.000.000,00	6	13.000.000,00	6	14.000.000,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				75.000.000,00		76.470.000,00		78.611.160,00		81.598.386,00		84.209.533,00		
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)	0	75	75.000.000,00	75	76.470.000,00	75	78.611.160,00	75	81.598.386,00	75	84.209.533,00	8.01.0.00.0.00.53.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				75.000.000,00		76.470.000,00		78.611.160,00		81.598.386,00		84.209.533,00		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di tahun n	Jumlah Orang yg Mengikuti Koordinasi di Bid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	20	25	75.000,00 0,00	25	76.470.000,00	25	78.611.160,00	25	81.598.386,00	25	84.209.533,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25.000.000,00		24.470.000,00		24.611.160,00		25.598.386,00		26.209.533,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	30	30	25.000.000,00	30	24.470.000,00	30	24.611.160,00	30	25.598.386,00	30	26.209.533,00		

	Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)													
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	20	25	40.000.000,00	25	41.000.000,00	25	42.000.000,00	25	43.000.000,00	25	44.000.000,00		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	6	6	10.000.000,00	6	11.000.000,00	6	12.000.000,00	6	13.000.000,00	6	14.000.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				900.000.000,00		917.640.000,00		943.333.920,00		979.180.608,00		1.010.514.389,00		
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Prosentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	0	100	900.000.000,00	100	917.640.000,00	100	943.333.920,00	100	979.180.608,00	100	1.010.514.389,00	8.01.0.00.0.00.53.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				900.000.000,00		917.640.000,00		943.333.920,00		979.180.608,00		1.010.514.389,00		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di tahun n	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	900.000.000,00	12	917.640.000,00	12	943.333.920,00	12	979.180.608,00	12	1.010.514.389,00		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	45	50		52		54		56		58			
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	45	63		65		66		67		68			

	Konflik di Daerah (Orang)													
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				129.000.000,00		130.000.000,00		136.000.000,00		142.000.000,00		144.514.389,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	45	63	129.000.000,00	65	130.000.000,00	66	136.000.000,00	67	142.000.000,00	68	144.514.389,00		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25.000.000,00		28.640.000,00		33.000.000,00		39.180.608,00		42.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	45	50	25.000.000,00	52	28.640.000,00	54	33.000.000,00	56	39.180.608,00	58	42.000.000,00		

8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.000.000,00		19.000.000,00		22.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	6	6	15.000.000,00	6	19.000.000,00	6	22.000.000,00	6	28.000.000,00	6	29.000.000,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				731.000.000,00		740.000.000,00		752.333.920,00		770.000.000,00		795.000.000,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	731.000.000,00	12	740.000.000,00	12	752.333.920,00	12	770.000.000,00	12	795.000.000,00		

4.4 Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Mendukung Program Ende Toleran
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan Paskibraka	
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terwujudnya Pendidikan Politik Pada Kader Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	

			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Ormas terhadap Ormas yang aktif	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, bagi masyarakat dan Generasi Muda	Persen	66,60%	66,90%	67,10%	67,30%	67,40%	67,50%	68,00%	
2.	Nilai AKIP Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende	Predikat	B	B	B	B	B	BB	BB	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik, disusunlah Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang aktif	%	55	56	58	59	59
4	Persentasi kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	75	75	75	75	75
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
6	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	%	100	100	100	100	100

Demikian penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029 yang memuat prioritas pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dengan maksud membuat landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan program pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende serta dapat mencapai Target yang telah ditetapkan pada Visi Misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029.

Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan kaidah pelaksanaannya. Kaidah – kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah prinsip – prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



1. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029
2. Pelaksanaan RENSTRA harus konsisten dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, konsisten ini memastikan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan berada pada jalur yang benar
3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Daerah Tahun 2025 – 2029.

Demikian Renstra Badan Kesbangpol Daerah ini disusun agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Daerah secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam

pencapaian, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Plt. Kepala Badan Kesbangpolda	